



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
SEKRETARIAT JENDERAL**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR : KEP/195/II/2022**

TENTANG

**KODE PROGRAM DAN ANGGARAN
UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN PERTAHANAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

DITETAPKAN DI JAKARTA

PADA TANGGAL 22 FEBRUARI TAHUN 2022



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
SEKRETARIAT JENDERAL**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR : KEP/195/III/2022**

TENTANG

**KODE PROGRAM DAN ANGGARAN
UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN PERTAHANAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

SEKRETARIS JENDERAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan program dan anggaran Unit Organisasi Kementerian Pertahanan Tahun Anggaran 2022, perlu adanya Kode Program dan Anggaran sebagai landasan administrasi pengelolaan keuangan negara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan tentang Kode Program dan Anggaran Unit Organisasi Kementerian Pertahanan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1355/XI/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Kode Program dan Anggaran Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas Nomor: S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN TENTANG KODE PROGRAM DAN ANGGARAN UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN PERTAHANAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU

- KESATU : Kode Program dan Anggaran Unit Organisasi Kementerian Pertahanan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini menjadi pedoman dalam penetapan Kode Program dan Anggaran bagi satuan kerja dalam pengelolaan keuangan negara Unit Organisasi Kementerian Pertahanan.
- KETIGA : Seluruh proses pengelolaan keuangan negara Unit Organisasi Kementerian Pertahanan harus dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, tidak ada konflik kepentingan serta menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan adanya perubahan.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Irjen Kemhan
 2. Rektor Unhan RI
 3. Dirjen Strahan Kemhan
 4. Dirjen Renhan Kemhan
 5. Dirjen Pothan Kemhan
 6. Dirjen Kuathan Kemhan
 7. Kabaranaan Kemhan
 8. Kabadiklat Kemhan
 9. Kabalitbang Kemhan
 10. Kabainstrahan Kemhan
 11. Kapuslaik Kemhan
 12. Kapusdatin Kemhan
 13. Kapuslapbinkuhan Kemhan
 14. Kapusrehab Kemhan
 15. Karoortala Setjen Kemhan
 16. Karopeg Setjen Kemhan
 17. Karokum Setjen Kemhan
 18. Karoturdang Setjen Kemhan
 19. Karoum Setjen Kemhan
 20. Karorenku Setjen Kemhan
 21. Karo TU dan Prot Setjen Kemhan
 22. Karohumas Setjen Kemhan
 23. Ka PCLS Kemhan

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

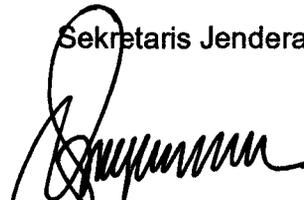
KETUJUH....

KETUJUH : Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pertahanan RI
2. Wamenhan RI

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2022

Sekretaris Jenderal,



Donny Ermawan T., M.D.S.
Marsekal Madya TNI

DAFTAR ISI

Halaman

Keputusan Sekjen Kemhan Nomor Kep/ /II/2022 tanggal Februari Tahun 2022 tentang Kode Program dan Anggaran UO Kemhan TA 2022.

BAB I	PENDAHULUAN	1-3
	1. Umum	1
	2. Maksud dan Tujuan	1
	3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.....	1
	4. Dasar	2
	5. Pengertian.....	2
BAB II	KETENTUAN-KETENTUAN	5
	6. Umum	5
	7. Tujuan dan Sasaran.....	5
	8. Prinsip.....	6
BAB III	KODE PROGRAM DAN ANGGARAN	6-8
	9. Umum	6
	10. Struktur Program.....	6
	11. Program dan Kegiatan	7
	12. Struktur Program dan Anggaran Belanja.....	8
	13. Struktur Program dan Anggaran Pendapatan.....	8
	14. Susunan Nomor Kode Program dan Anggaran	8
BAB IV	PENUTUP	11

DAFTAR LAMPIRAN, SUB LAMPIRAN DAN DAFTAR DISTRIBUSI

LAMPIRAN	KODE PROGRAM DAN ANGGARAN UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN PERTAHANAN
SUBLAMPIRAN A	SUSUNAN NOMOR KODE PROGRAM DAN ANGGARAN BELANJA
SUBLAMPIRAN B	NOMOR KODE BAGIAN ANGGARAN BELANJA
SUBLAMPIRAN C	NOMOR KODE POS
SUBLAMPIRAN D	KODE AKUN BELANJA
SUBLAMPIRAN E	SUSUNAN NOMOR KODE PROGRAM DAN ANGGARAN PENDAPATAN
SUBLAMPIRAN F	NOMOR KODE BAGIAN PENDAPATAN
SUBLAMPIRAN G	KODE AKUN PENDAPATAN
SUBLAMPIRAN H	SATKER PENERIMA - DIPA

**KODE PROGRAM DAN ANGGARAN
UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN PERTAHANAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum.

- a. Program dan anggaran Unit Organisasi Kementerian Pertahanan (UO Kemhan) pada hakikatnya harus diwujudkan dan dilaksanakan secara selektif dan realistis melalui penyesuaian secara komprehensif dan proporsional dengan tetap mengacu pada prioritas pencapaian sasaran kebijakan, pengembangan dan pembangunan kekuatan, pembinaan, dukungan manajemen dan riset, industri, pendidikan tinggi. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Program dan Anggaran yang terukur, terarah dan akuntabel bagi satuan kerja UO Kemhan, penyusunannya harus berpedoman pada kode program dan anggaran.
- b. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor Kep/1355/XI/2021 tanggal 15 November 2021 tentang kode program dan anggaran Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun Anggaran 2022 yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan dokumen pengelolaan Program dan Anggaran yang transparan dan akuntabel.
- c. Guna terwujudnya keselarasan dan keseragaman pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam melaksanakan kode program dan anggaran maka perlu disusun Kode Program dan Anggaran di UO Kemhan Tahun Anggaran 2022.

2. Maksud dan Tujuan.

- a. **Maksud.** Kode Program dan Anggaran dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang susunan abjad dan numerik tertentu menjadi suatu kodifikasi yang berlaku di UO Kemhan.
- b. **Tujuan.** Kode Program dan Anggaran bertujuan untuk dijadikan pedoman kodifikasi bagi semua entitas pengelolaan keuangan negara di UO Kemhan.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

- a. **Ruang Lingkup.** Kode Program dan Anggaran UO Kemhan Tahun Anggaran 2022 ini memuat Struktur Program, Struktur Program dan Anggaran Belanja, Struktur Program dan Anggaran Pendapatan serta Susunan Nomor Kode Program dan Anggaran.

b. Tata Urut...

b. **Tata Urut.** Kode Program dan Anggaran UO Kemhan TA 2022 ini disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan.
- 2) Ketentuan-ketentuan.
- 3) Kode Program dan Anggaran.
- 4) Penutup.

4. **Dasar.**

- a. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor KEP-135/PB/2020 tanggal 23 Juni 2020 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen pada Bagan Akun Standar;
- b. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 23 Januari 2020 tentang Pengelolaan Program dan Anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI;
- c. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor Kep/1355/XI/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Kode Program dan Anggaran Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun Anggaran 2022;
- d. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor Kep/1360/M/XI/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Penetapan Satuan Kerja, Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, dan Penetapan Jenis Kewenangan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- e. Peraturan Direktorat Jenderal Pertahanan Keamanan Nomor 01 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Kemhan dan TNI;
- f. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2022 Unit Organisasi Kemhan Nomor SP DIPA-012.01-0/2022 Kode *Digital Stamp* (DS):1084-0820-3027-4298 tanggal 17 November 2021; dan
- g. Keputusan Sekjen Kemhan Nomor: KEP/1660/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran UO Kemhan Tahun 2022.

5. **Pengertian.**

- a. **Pengelolaan Program dan Anggaran.** Pengelolaan Program dan Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah suatu proses dalam mengelola program dan anggaran dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan program dan anggaran untuk mewujudkan PPA yang efektif, efisien, ekonomis dan transparan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
- b. **Kode.** Kode adalah aturan untuk mengubah suatu informasi menjadi bentuk atau representasi lain, yang tidak harus dalam bentuk yang sama.

c. **Akuntabel....**

- c. **Akuntabel.** Akuntabel adalah bentuk pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran, target atau program yang telah ditetapkan.
- d. **Efektif.** Efektif adalah keberhasilan tentang suatu usaha dan tindakan yang dilakukan dapat membawa hasil/berhasil guna.
- e. **Efisien.** Efisien adalah kecermatan dalam melaksanakan suatu kegiatan dengan hasil optimal (mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat berdaya guna atau bertepatan guna).
- f. **Tujuan.** Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu dua sampai dengan lima tahun ke depan.
- g. **Sasaran.** Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu program atau keluaran dari suatu kegiatan.
- h. **Unit Organisasi.** Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara.
- i. **Satuan Kerja.** Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Pertahanan/TNI yang melaksanakan kegiatan Kementerian Pertahanan/TNI dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
- j. **Fungsi.** Fungsi adalah sekelompok jenis pekerjaan, kegiatan dan upaya yang dilakukan satu sama lain saling ada ketergantungan untuk melaksanakan segi-segi tertentu dari suatu tugas pokok.
- k. **Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar.** Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang kemudian disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
- l. **Pejabat Pembuat Komitmen.** Pejabat Pembuat Komitmen yang kemudian disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
- m. **Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan.** Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan adalah program teknis yang meliputi kegiatan perumusan Kebijakan dan Regulasi Pertahanan yang tercantum dalam program dan anggaran UO Kemhan.
- n. **Program Modernisasi Alutsista/Non Alutsista/Sarpras Pertahanan.** Program Modernisasi Alutsista/Non Alutsista/Sarpras Pertahanan adalah program teknis yang meliputi tiga kegiatan yang tercantum dalam program dan anggaran UO Kemhan.
- o. **Program....**

- o. **Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan.** Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan adalah program teknis yang meliputi dua kegiatan yang tercantum dalam program dan anggaran UO Kemhan.
- p. **Program Riset, Industri dan Pendidikan Tinggi Pertahanan.** Program Riset, Industri dan Pendidikan Tinggi Pertahanan adalah program teknis yang meliputi tiga kegiatan yang tercantum dalam program dan anggaran UO Kemhan.
- q. **Program Dukungan Manajemen.** Program Dukungan Manajemen adalah program generik yang meliputi sembilan kegiatan yang tercantum dalam program dan anggaran UO Kemhan.
- r. **Kegiatan.** Kegiatan adalah penjabaran dari program yang rumusnya mencerminkan tugas dan fungsi satuan kerja atau penugasan tertentu Kementerian/Lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran (*output*) dengan indikator kinerja yang terukur.
- s. **Surat Permintaan Pembayaran.** Surat Permintaan Pembayaran yang kemudiann disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
- t. **Surat Perintah Membayar.** Surat Perintah Membayar yang kemudian disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
- u. **Belanja Pegawai.** Belanja Pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS dan/atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi UO pemerintah.
- v. **Belanja Barang dan Jasa.** Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan.
- w. **Belanja Modal.** Belanja Modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya atau menambah nilai aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.
- x. **Belanja Lain-lain.** Belanja Lain-lain adalah pengeluaran Negara untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja pembayaran utang, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.

y. **Program....**

- y. **Program.** Program adalah penjabaran dari Kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kemhan yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi jabatan eselon I atau Kepala Unit Organisasi TNI/Angkatan yang berisi satu atau beberapa kegiatan untuk mencapai hasil (*outcome*) dengan indikator kinerja yang terukur.
- z. **Klasifikasi Rincian Output.** Klasifikasi Rincian *Output* yang selanjutnya disingkat KRO adalah kumpulan rincian *output* yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan keluaran (*Output*) kegiatan yang sejenis/ serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis.
- aa. **Rincian Output.** Rincian *Output* yang selanjutnya disingkat RO adalah keluaran (*Output*) kegiatan riil yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja Kementerian/Lembaga yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu.
- bb. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.** Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- cc. **Pengguna Anggaran.** Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Pertahanan yang mempunyai kewenangan penggunaan anggaran pada Bagian Anggaran Kemhan.
- dd. **Kuasa Pengguna Anggaran.** Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Bagian Anggaran Kemhan.
- ee. **Bendahara Pengeluaran.** Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN pada Kemhan dan TNI.

BAB II KETENTUAN-KETENTUAN

- 6. **Umum.** Kode Program dan Anggaran disusun secara berurutan, benar dan tertib untuk menghasilkan dokumen pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel dengan tetap berpedoman pada tujuan, sasaran, dan prinsip.
- 7. **Tujuan dan Sasaran.**
 - a. **Tujuan.** Untuk mewujudkan kesamaan kodifikasi secara berurutan, benar, dan tertib dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara.
 - b. **Sasaran.**
 - 1) terwujudnya tertib administrasi terkait kodifikasi program dan anggaran UO Kemhan;
 - 2) terwujudnya....

- 2) terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara UO Kemhan; dan
- 3) tercapainya kinerja organisasi yang terukur untuk mendukung program reformasi birokrasi UO Kemhan.

8. Prinsip.

- a. **Sederhana.** Kode Program dan Anggaran disusun sedemikian rupa sehingga mudah dikerjakan oleh para pelaksana serta mudah dimengerti/dipahami oleh pejabat yang memerlukan.
- b. **Benar.** Kode Program dan Anggaran ditulis secara berurutan, tepat dan tertib.
- c. **Transparansi.** Memberikan informasi yang terbuka dan jujur untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pelaksanaan anggaran dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
- d. **Akuntabilitas.** Penggunaan Kode Program dan Anggaran menghasilkan laporan pelaksanaan anggaran yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- e. **Konsistensi.** Penggunaan Kode Program dan Anggaran memiliki kesamaan pada dokumen anggaran.
- f. **Objektif.** Penggunaan Kode Program dan Anggaran berdasarkan data pada dokumen anggaran.
- g. **Terencana.** Penggunaan Kode Program dan Anggaran berfikir kedepan mengenai jalannya kegiatan yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor.
- h. **Terkendali.** Penggunaan Kode Program dan Anggaran sebagai pengendali kegiatan dalam pelaksanaan anggaran.
- i. **Efektif.** Penggunaan Kode Program dan Anggaran untuk mencapai suatu tujuan dengan tepat dan cepat.
- j. **Efisien.** Penggunaan Kode Program dan Anggaran untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan daya yang minimal dengan hasil yang maksimal.

BAB III KODE PROGRAM DAN ANGGARAN

9. **Umum.** Kode Program dan Anggaran meliputi Struktur Program, Struktur Program dan Anggaran Belanja, Struktur Program dan Anggaran Pendapatan serta Susunan Nomor Kode Program dan Anggaran.
10. **Struktur Program.** UO Kemhan memiliki 5 (lima) program yang dituangkan dalam Fungsi Pertahanan dan Fungsi Pendidikan, yaitu:

a. Fungsi....

- a. Fungsi Pertahanan dengan Sub Fungsi Pertahanan Negara meliputi:
 - 1) Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan.
 - 2) Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan.
 - 3) Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan.
 - 4) Program Dukungan Manajemen.
 - 5) Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan.

- b. Fungsi Pendidikan dengan Sub Fungsi Pendidikan Tinggi meliputi:
 - 1) Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan.
 - 2) Program Dukungan Manajemen.

- 11. **Program dan Kegiatan.** 5 (lima) Program UO Kemhan meliputi 18 (delapan belas) kegiatan, yaitu:
 - a. Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan Negara.
 - Perumusan Kebijakan dan Regulasi Pertahanan Negara.

 - b. Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista dan Sarpras Pertahanan.
 - 1) Pembangunan/Pengadaan Sarpras Pertahanan.
 - 2) Pengadaan Non Alutsista (Kemhan).
 - 3) Pengadaan/Harwat Alutsista Strategis.

 - c. Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan.
 - 1) Pembinaan Kesadaran Bela Negara.
 - 2) Pembinaan Potensi dan Kekuatan Sumber Daya Pertahanan.

 - d. Program Dukungan Manajemen.
 - 1) Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Kemhan.
 - 2) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.
 - 3) Pengelolaan Organisasi dan SDM Kemhan.
 - 4) Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Kemhan.
 - 5) Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Kemhan.
 - 6) Legislasi dan Litigasi Kemhan.
 - 7) Pengelolaan Resiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal Kemhan.
 - 8) Pendidikan dan Pelatihan.
 - 9) Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Universitas Pertahanan.

 - e. Program Riset, Industri dan Pendidikan Tinggi Pertahanan.
 - 1) Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pertahanan
 - 2) Pembinaan dan Pengembangan Industri Pertahanan
 - 3) Penelitian dan Pengembangan Pertahanan

12. **Struktur Program dan Anggaran Belanja.** Struktur Program dan Anggaran Belanja meliputi Kode Bagian, Kode Pos dan Kode Akun.
- a. **Kode Bagian.** Kode Bagian mencerminkan Instansi Pengguna Anggaran (IPA) secara bertingkat, terdiri atas:
 - 1) Kementerian Pertahanan.
 - 2) UO Kemhan.
 - 3) Satker.
 - b. **Kode Pos.** Kode Pos mencerminkan fungsi anggaran yang dialokasikan, terdiri atas:
 - 1) Fungsi.
 - 2) Sub Fungsi.
 - 3) Program.
 - 4) Kegiatan.
 - 5) KRO.
 - c. **Kode Akun.** Kode Akun mencerminkan objek anggaran yang terinci, terdiri dari jenis belanja dan uraian jenis belanja:
 - 1) Belanja Pegawai.
 - 2) Belanja Barang.
 - 3) Belanja Modal.
13. **Struktur Program dan Anggaran Pendapatan.** Struktur Program dan Anggaran Pendapatan meliputi Kode Bagian dan Kode Akun.
- a. **Kode Bagian.** Kode Bagian mencerminkan organisasi anggaran pendapatan/penerimaan untuk negara, terdiri atas:
 - 1) Kementerian Pertahanan.
 - 2) UO Kemhan.
 - 3) Satker.
 - b. **Kode Akun.** Kode Akun mencerminkan objek penerimaan negara terdiri atas:
 - 1) Pendapatan Negara.
 - a) Pendapatan Pajak.
 - b) Pendapatan Non pajak
 - 2) Uraian Pendapatan Negara.
14. **Susunan Nomor Kode Program dan Anggaran.** Nomor Kode Program dan Anggaran disusun secara sistematis dan terperinci sesuai dengan tujuan penggunaannya dalam pengelolaan keuangan negara yang berlaku di UO Kemhan meliputi penomoran untuk anggaran belanja dan pendapatan serta pencatatan kas.
- a. **Susunan Nomor Kode Program dan Anggaran Belanja.** Susunan Nomor Kode Program dan Anggaran Belanja sebagaimana tercantum dalam **Sublampiran A** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekjen Kemhan ini.

- 1) Susunan Nomor Kode Program dan Anggaran Belanja terdiri atas 30 digit, disusun dalam 3 kelompok:
 - a) Nomor Kode Bagian 11 digit.
 - b) Nomor Kode Pos 13 digit.
 - c) Nomor Kode Akun 6 digit.

- 2) Uraian Kode Bagian, Kode Pos dan Kode Akun.
 - a) Nomor Kode Bagian. Nomor Kode Bagian sebagaimana tercantum dalam **Sublampiran B** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekjen Kemhan ini, meliputi Nomor Kode Kementerian, Unit Organisasi dan Satker, terdiri atas 11 digit yang ditempatkan dalam kelompok pertama dengan susunan sebagai berikut:
 - (1) Digit ke-1, ke-2 dan ke-3 menunjukkan Kementerian.
 - (2) Digit ke-4 dan ke-5 menunjukkan Unit Organisasi.
 - (3) Digit ke-6 sampai dengan ke-11 menunjukkan Satker.

 - b) Nomor Kode Pos. Nomor Kode Pos sebagaimana tercantum dalam **Sublampiran C** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekjen Kemhan ini, meliputi Nomor Kode Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan dan KRO terdiri atas 13 digit yang ditempatkan dalam kelompok kedua, dengan susunan sebagai berikut:
 - (1) Digit ke-12 dan ke-13 menunjukkan Fungsi.
 - (2) Digit ke-14 dan ke-15 menunjukkan Sub Fungsi.
 - (3) Digit ke-16, dan ke-17 menunjukkan Program.
 - (4) Digit ke-18, ke-19, ke-20, dan ke-21 menunjukkan Kegiatan.
 - (5) Digit ke-22, ke-23 dan ke-24 menunjukkan KRO.

 - c) Nomor Kode Akun. Nomor Kode Akun sebagaimana tercantum dalam **Sublampiran D** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekjen Kemhan ini, meliputi Nomor Kode Jenis Belanja dan Uraian Belanja, terdiri atas 6 digit yang ditempatkan dalam kelompok ketiga dengan susunan sebagai berikut:
 - (1) Digit ke-25 dan ke-26 menunjukkan Jenis Belanja.
 - (2) Digit ke-27 sampai dengan ke-30 menunjukkan Uraian Jenis Belanja.

Contoh Penomoran Akun Belanja.

SPP

01201683787	0201WA6548FAH	521213
-------------	---------------	--------

01221683787 = KODE BAGIAN (11 DIGIT)
 012 = Kementerian Pertahanan
 01 = UO Kemhan
 683787 = Satker Biro Perencanaan dan Keuangan
 Setjen Kemhan

0201WA6548FAH = KODE POS (13 DIGIT)

02	=	Fungsi Pertahanan
01	=	Sub Fungsi Pertahanan Negara
WA	=	Program Dukungan Manajemen
6548	=	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Kemhan
FAH	=	KRO Pengelolaan Keuangan Negara
521213	=	KODE AKUN (6 DIGIT)
52	=	Jenis Belanja Barang
1213	=	Belanja Honor Output Kegiatan (Uraian Jenis Belanja)

SPM

01201683787	0201WA6548FAH	521213
-------------	---------------	--------

01201683787	=	KODE BAGIAN (11 DIGIT)
012	=	Kementerian Pertahanan
01	=	UO Kemhan
683787	=	Satker Biro Perencanaan dan Keuangan
0201WA6548FAH	=	KODE POS (13 DIGIT)
02	=	Fungsi Pertahanan
01	=	Sub Fungsi Pertahanan Negara
WA	=	Program Dukungan Manajemen
6548	=	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Kemhan
FAH	=	KRO Pengelolaan Keuangan Negara
521213	=	KODE AKUN (6 DIGIT)
52	=	Jenis Belanja Barang
1213	=	Belanja Honor Output Kegiatan (Uraian Jenis Belanja)

b. **Susunan Nomor Kode Program dan Anggaran Pendapatan.** Susunan Nomor Kode Program dan Anggaran Pendapatan sebagaimana tercantum dalam **Sublampiran E** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekjen Kemhan ini, meliputi Nomor Kode Bagian dan Kode Akun.

- 1) Nomor Kode Bagian. Nomor Kode Bagian sebagaimana tercantum dalam **Sublampiran F** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekjen Kemhan ini, meliputi Nomor Kode Kementerian, Unit Organisasi, Satker, terdiri atas 11 digit yang ditempatkan dalam kelompok pertama dengan susunan sebagai berikut:
 - a) Digit ke-1, ke-2, dan ke-3 menunjukkan Kementerian.
 - b) Digit ke-4 dan ke-5 menunjukkan Unit Organisasi.
 - c) Digit ke-6 sampai dengan ke-11 menunjukkan Satker.
- 2) Nomor Kode Akun. Nomor Kode Akun sebagaimana tercantum dalam **Sublampiran G** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekjen Kemhan ini, meliputi Nomor Kode Akun Pendapatan yang bersumber dari pajak dan nonpajak, terdiri atas 6 digit yang ditempatkan dalam kelompok kedua dengan susunan sebagai berikut:
 - a) Digit ke-12...

- a) Digit ke-12 dan ke-13 menunjukkan Pendapatan Negara.
- b) Digit ke-14, ke-15, ke-16, dan ke-17 menunjukkan Uraian Pendapatan Negara.

Contoh Penomoran Akun Pendapatan (Penerimaan).

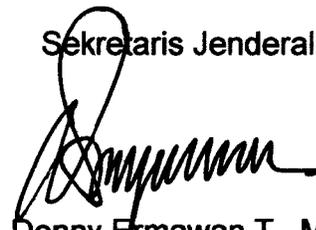
01201683787	411122
-------------	--------

01221683787	=	KODE BAGIAN (11 DIGIT)
012	=	Kementerian Pertahanan
01	=	UO Kemhan
683787	=	Satker Biro Perencanaan dan Keuangan
411122	=	KODE AKUN (6 DIGIT)
41	=	Pendapatan Perpajakan
1122	=	Pendapatan PPh Pasal 22

BAB IV PENUTUP

Kode Program dan Anggaran UO Kemhan ini menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan negara di UO Kemhan. Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

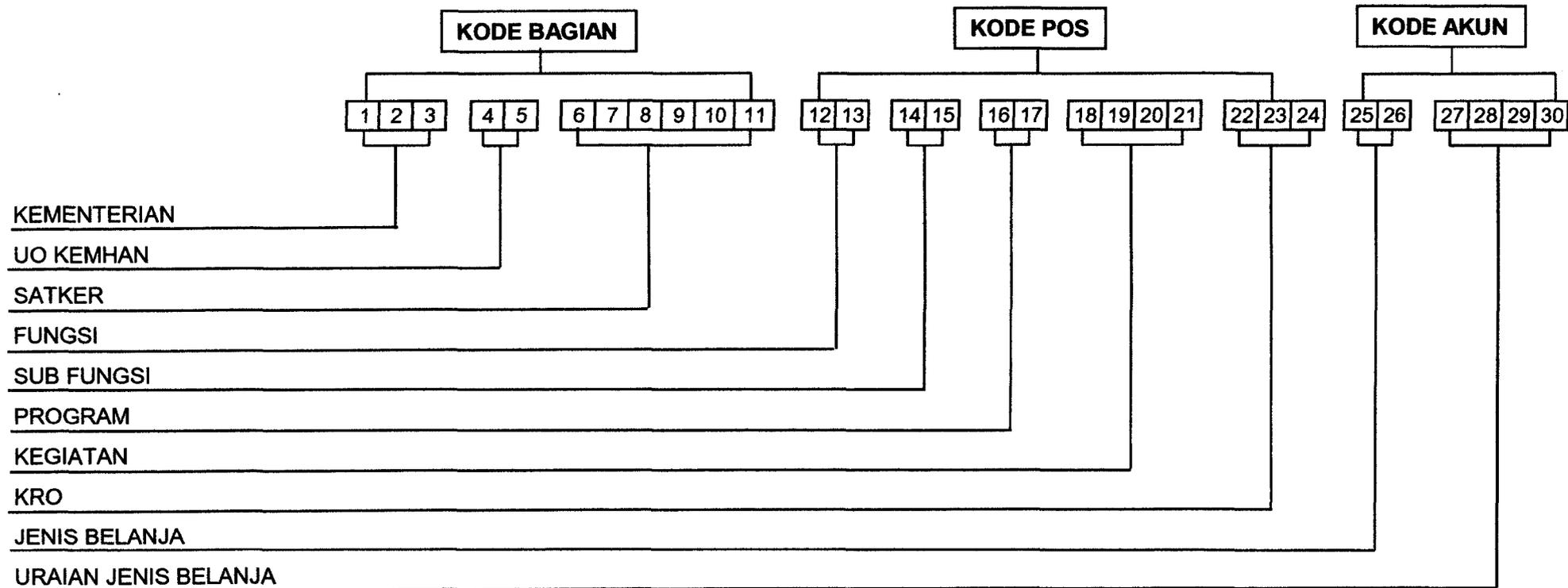
Sekretaris Jenderal,



Donny Ermawan T., M.D.S.
Marsekal Madya TNI

Sublampiran A
dari Lampiran Keputusan Sekjen Kemhan
Nomor : **kep/195** /III/ 2022
Tanggal : **22** Februari 2022

SUSUNAN NOMOR KODE PROGRAM DAN ANGGARAN BELANJA



Sekretaris Jenderal,

Donny Ermawan T., M.D.S.
Marsekal Madya TNI

Sublampiran B
dari Lampiran Keputusan Sekjen Kemhan
Nomor : **KEP / 195** /II/ 2022
Tanggal : **22** Februari 2022

NOMOR KODE BAGIAN ANGGARAN BELANJA

Nomor Kode Bagian ditempatkan pada kelompok pertama dalam susunan Nomor Kode Program dan Anggaran Belanja, terdiri dari 11 digit yang meliputi Nomor Kode Kementerian, Nomor Kode Unit Organisasi dan Nomor Kode Satuan Kerja, dengan susunan sebagai berikut:

1. Nomor Kode Kementerian.

Nomor Kode Kementerian terdiri dari 3 digit yang menempati digit ke-1, ke-2 dan ke-3 dalam susunan Nomor Kode Program dan Anggaran Belanja.

NOMOR KODE KEMENTERIAN	URAIAN
012	Kementerian Pertahanan (Kemhan)
999	Bendahara Umum Negara (Kemkeu)

2. Nomor Kode UO.

Nomor Kode UO terdiri dari 2 digit yang menempati digit ke-4 dan ke-5 dalam susunan Nomor Kode Program dan Anggaran Belanja.

NOMOR KODE UNIT ORGANISASI (UO)	URAIAN
01	UO Kemhan

3. Nomor ...

3. Nomor Kode Satuan Kerja (Satker).

Nomor Kode Satuan Kerja UO Kemhan terdiri dari 6 digit yang menempati digit ke-6 sampai dengan ke-11 dalam susunan Nomor Kode Program dan Anggaran Belanja.

NO URUT	NOMOR KODE SATKER/	SATUAN KERJA (SATKER)	ALAMAT
1	2	3	4
1.	461838	BAINSTRAHAN KEMHAN	Gd. <i>Stand By Force</i> Lt. 2 PMPP TNI Jl. Anyar Sentul, Bogor Jawa Barat
2.	683005	BIRO ORTALA SETJEN KEMHAN	Gd. S. Parman Lt. 3 Jl. Medan Merdeka Barat No.13-14 Jakarta Pusat
3.	683007	BIRO PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SETJEN KEMHAN	Gd. Ahmad Yani Jl. Medan Merdeka Barat No.13-14 Jakarta Pusat
4.	683009	PUSAT KELAIKAN KEMHAN	Gd. AH. Nasution Lt.14 Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat
5.	683787	BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN SETJEN KEMHAN	Gd. S. Parman Jl. Medan Merdeka Barat No.13-14 Jakarta Pusat
6.	683791	BIRO KEPEGAWAIAN SETJEN KEMHAN	Gd. S. Parman Jl. Medan Merdeka Barat No.13-14 Jakarta Pusat
7.	683809	BIRO HUKUM SETJ EN KEMHAN	Gd. S. Parman Jl. Medan Merdeka Barat No.13-14 Jakarta Pusat
8.	683813	INSPEKTORAT JENDERAL KEMHAN	Gd. Jenderal Gatot Subroto Lt.1 Jl. Medan Merdeka Barat No.13-14 Jakarta Pusat
9.	683820	DITJEN STRAHAN KEMHAN	Gd. Ahmad Yani Jl. Medan Merdeka Barat No.13-14. Jakarta Pusat
10.	683834	DITJEN RENHAN KEMHAN	Gd.M.Sjafruddin Prawiranegara Lt.3 Jl. Budi Kemuliaan No.4-6 Jakarta Pusat
11.	683841	DITJEN POTHAN KEMHAN	Gd. Jenderal Suprpto Lt.3 Jl. Tanah Abang Timur No.8 Jakarta Pusat
12.	683855	DITJEN KUATHAN KEMHAN	Gd. DI. Panjaitan Lt.2 Jl. Tanah Abang Timur No.7 Jakarta Pusat
13.	683862	BARANAHAN KEMHAN	Gd. AH. Nasution Lt.11 & 12 Jl. Medan Merdeka Barat No.13-14 Jakarta Pusat
14.	683876	BADIKLAT KEMHAN	Gd. Ki Hajar Dewantoro Lt.2 Jl. Salemba Raya No.14 Jakarta Pusat
15.	683880	BALITBANG KEMHAN	Gd. Soepomo Lt.3 Jl. Pangkalan Jati No.1 Pondok Labu Jakarta Selatan

16. 683897 ...

1	2	3	4
16.	683897	UNIVERSITAS PERTAHANAN RI	Jl. Kawasan Unhan IPSC Sentul, Bogor Jawa Barat
17.	686023	BIRO TU DAN PROTOKOL SETJEN KEMHAN	Gd. Jenderal Gatot Subroto Lt.1 Jl. Medan Merdeka Barat No.13-14 Jakarta Pusat
18.	686030	BIRO UMUM SETJEN KEMHAN	Gd. Pierre Tendean Lt.3 Jl. Tanah Abang Timur No.4 Jakarta Pusat
19.	686044	PUSLAPBINKUHAN KEMHAN	Gd. AH. Nasution Lt.16 Jl. Medan Merdeka Barat No.13-14 Jakarta Pusat
20.	686051	PUSDATIN KEMHAN	Gd. Untung Suropati Lt.1 Jl. Fatmawati No.1 Jakarta Selatan
21.	686065	PUSREHAB KEMHAN	Gd. Jenderal M.T. Haryono Jl. R.C Veteran No.178 Bintaro Jakarta Selatan
22.	686072	BIRO HUMAS SETJEN KEMHAN	Gd. AH. Nasution Lt.14 Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat
23.	683810	PUSAT CADANGAN LOGISTIK STRATEGIS	Gd. AH. Nasution Lt.13 Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat

Sekretaris Jenderal,



Donny Ermawan T., M.D.S.

Marsekal Madya TNI

NOMOR KODE POS

Nomor Kode Pos ditempatkan pada kelompok kedua dalam Susunan Nomor Kode Program dan Anggaran Belanja terdiri dari 13 digit yang meliputi Nomor Kode Fungsi, Nomor Kode Sub Fungsi, Nomor Kode Program, Nomor Kode Kegiatan dan Nomor Kode *Output* dengan susunan sebagai berikut :

1. Nomor Kode Fungsi.

Nomor Kode Fungsi terdiri dari 2 digit yang menempati digit ke-12 dan ke-13 dalam susunan Nomor Kode Program dan Anggaran Belanja.

NOMOR KODE FUNGSI	URAIAN
02	Fungsi Pertahanan
10	Fungsi Pendidikan

2. Nomor Kode Sub Fungsi.

Nomor Kode Fungsi terdiri dari 2 digit yang menempati digit ke-14 dan ke-15 dalam susunan Nomor Kode Program dan Anggaran Belanja.

NOMOR KODE SUBFUNGSI	URAIAN
01	Subfungsi Pertahanan Negara
06	Subfungsi Pendidikan Tinggi

3. Nomor Kode Program.

Nomor Kode Program terdiri dari 2 digit yang menempati digit ke-16 dan ke-17 dalam Susunan Nomor Kode Program dan Anggaran Belanja

NO. KODE PROGRAM	URAIAN
01	Subfungsi Pertahanan Negara
AD	Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan.
AF	Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan.
AJ	Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan.
WA	Program Dukungan Manajemen.

01 Sub ...

NO. KODE PROGRAM	URAIAN
01	Subfungsi Pendidikan Tinggi
KA	Program Riset, Industri dan Pendidikan Tinggi Pertahanan.

4. Nomor Kode Kegiatan.

Nomor Kode Kegiatan terdiri dari 4 digit yang menempati digit ke-18 sampai dengan ke-21 dalam Susunan Nomor Kode Program dan Anggaran Belanja

NO.	NO. KODE KEGIATAN	URAIAN
1.	01.AD	Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan.
1	1389	Perumusan Kebijakan dan Regulasi Pertahanan Negara
2.	01.AF	Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan.
2	6552	Pembangunan/Pengadaan Sarpras Pertahanan
3	6553	Pengadaan Non Alutsista (Kemhan)
4	6559	Pengadaan/Harwat Alutsista Strategis
3.	01.AJ	Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan.
5	1403	Pembinaan Kesadaran Bela Negara
6	6554	Pembinaan Potensi dan Kekuatan Sumber Daya Pertahanan
4.	01.KA	Program Riset, Industri dan Pendidikan Tinggi Pertahanan.
7	1386	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pertahanan
8	1406	Pembinaan dan Pengembangan Industri Pertahanan
9	6555	Penelitian dan Pengembangan Pertahanan

5. 01.WA ...

5	01.WA	Program Dukungan Manajemen.
10	1354	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Kemhan
11	1358	Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan
12	1361	Pengelolaan Organisasi dan SDM Kemhan
13	1365	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Kemhan
14	6548	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Kemhan
15	6549	Legislasi dan Litigasi Kemhan
16	6550	Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal Kemhan
17	6551	Pendidikan dan Latihan
18	6558	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Unhan

5. Nomor Kode Klasifikasi Rincian *Output* (KRO).

Nomor Kode Klasifikasi Rincian *Output* (KRO) terdiri dari 3 digit yang menempati digit ke-22, ke-23 dan ke-24 dalam Susunan Nomor Kode Program dan Anggaran Belanja

No	Nomor Kode KRO	Uraian
1	2	3
1	AAA	Undang-Undang
2	AAC	Peraturan Pemerintah
3	AAD	Peraturan Presiden
4	AAE	Keputusan Presiden
5	AAG	Peraturan Menteri
6	AAH	Peraturan lainnya
7	ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan
8	ABM	Kebijakan Bidang Pelayanan Publik
9	ABT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan
10	ADD	Standarisasi Lembaga
11	ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM
12	AEA	Koordinasi
13	AEB	Forum
14	AEC	Kerja sama
15	AED	Perjanjian
16	AEF	Sosialisasi dan Diseminasi
17	AEG	Konferensi dan Event
18	AEH	Promosi
19	AFA	Norma, Standar, Prosedur dan Kinerja
20	BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat
21	BAH	Pelayanan Publik Lainnya
22	BBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan

1	2	3
23	BCA	Perkara Hukum Perseorangan
24	BCB	Perkara Hukum Lembaga
25	BDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri
26	BEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi
27	BGF	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pertahanan dan Keamanan
28	BHA	Operasi Bidang Pertahanan
29	BHB	Operasi Bidang Keamanan
30	BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk
31	BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat
32	BMA	Data dan Informasi Publik
33	BMB	Komunikasi Publik
34	CAA	Sarana Bidang Pendidikan
35	CAB	Sarana Bidang Kesehatan
36	CAF	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan
37	CBC	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)
38	CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi
39	CBM	Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan
40	CBO	Prasarana Pengembangan Kawasan
41	CBV	Prasarana Bidang Kesehatan
42	CCB-OM	Sarana Bidang Kesehatan
43	CCF-OM	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan
44	CDM-OM	Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan
45	DBA	Pendidikan Tinggi
46	DCA	Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika
47	DCG	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan
48	DCN	Pelatihan Bidang IPTEK
49	DDA	Penelitian dan Pengembangan Produk
50	DDB	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa
51	DDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling
52	EAA	Layanan Perkantoran
53	EAG	Layanan Hukum
54	EAJ	Layanan Data dan Informasi
55	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
56	EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal
57	EBC	Layanan Manajemen SDM Internal
58	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal
59	FAA	Kearsipan
60	FAB	Sistem Informasi Pemerintahan
61	FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara
62	FAD	Perencanaan dan Penganggaran
63	FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan

1	2	3
64	FAH	Pengelolaan Keuangan Negara
65	QHA	Operasi Bidang Pertahanan
66	RAF	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan
67	RBM	Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan
68	RCF-OM	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan

Sekretaris Jenderal,



Dornny Ermawan T., M.D.S.
Marsekal Madya TNI

Sublampiran D
 dari Lampiran Keputusan Sekjen Kemhan
 Nomor : **KEP/195** /III/ 2022
 Tanggal : **22** Februari 2022

KODE AKUN BELANJA

Nomor Kode Akun Belanja ditempatkan pada kelompok ketiga dalam susunan Nomor Kode Program dan Anggaran Belanja, terdiri dari 6 digit yang meliputi digit ke-25 dan ke-26 menunjukkan Jenis Belanja dan digit ke-27 sampai dengan ke-30 menunjukkan Uraian Jenis Belanja.

	5	BELANJA NEGARA
I.	51	BELANJA PEGAWAI
A.	511	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN PNS
1	5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
	51111	Belanja Gaji PNS
	511111	Belanja Gaji Pokok PNS
	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS
	51112	Belanja Tunjangan-Tunjangan I PNS
	511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS
	511122	Belanja Tunjangan Anak PNS
	511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS
	511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS
	511125	Belanja Tunjangan PPh PNS
	511126	Belanja Tunjangan Beras PNS
	511127	Belanja Tunjangan Kemahalan PNS
	511128	Belanja Tunjangan Lauk Pauk PNS
	511129	Belanja Uang Makan PNS
	51113	Belanja Tunjangan-Tunjangan II PNS
	511131	Belanja Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS
	511132	Belanja Tunjangan Cacat PNS
	511133	Belanja Tunjangan Khusus Peralihan PNS
	511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS
	511135	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS
	511136	Belanja Tunjangan Guru/Dosen/PNS yang Dipekerjakan pada Sekolah/ PT Swasta/ Badan/Komisi
	511137	Belanja Tunjangan Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk Mengikuti Pendidikan Pasca Sarjana PNS
	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS
	511139	Belanja Tunjangan SAR PNS
	51114	Belanja Tunjangan-Tunjangan III Pegawai Negeri/Staff di Luar Negeri
	511141	Belanja Tunjangan Sewa Rumah PNS (Staff di LN)
	511142	Belanja Tunjangan Restitusi Pengobatan PNS (Staff di LN)
	511143	Belanja Tunjangan <i>Social Security</i> PNS (Staff di LN)
	511144	Belanja Tunjangan Asuransi Kecelakaan PNS (Staff di LN)
	511145	Belanja Tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (Staff di LN)
	511146	Belanja Tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (Staff di LN)
	511147	Belanja Tunjangan Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri

	511149	Belanja Lokal Staff Lainnya
	51115	Belanja Tunjangan IV PNS
	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS
	511152	Belanja Tunjangan Profesi Guru
	511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen
	511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor
	511155	Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS
	511156	Belanja Tunjangan Khusus Guru/Dosen
	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim
	511158	Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc
	51116	Belanja Gaji-PNS TNI
	511161	Belanja Gaji Pokok PNS TNI
	511169	Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI
	51117	Belanja Tunjangan-Tunjangan I PNS TNI
	511171	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS TNI
	511172	Belanja Tunjangan Anak PNS TNI
	511173	Belanja Tunjangan Struktural PNS TNI
	511174	Belanja Tunjangan Fungsional PNS TNI
	511175	Belanja Tunjangan PPh PNS TNI
	511176	Belanja Tunjangan Beras PNS TNI
	511177	Belanja Tunjangan Kemahalan PNS TNI
	511178	Belanja Tunjangan Lauk Pauk PNS TNI
	511179	Belanja Uang Makan PNS TNI
	51118	Belanja Tunjangan-Tunjangan II PNS TNI
	511181	Belanja Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS TNI
	511182	Belanja Tunjangan Cacat PNS TNI
	511183	Belanja Tunjangan Khusus Peralihan PNS TNI
	511184	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS TNI
	511185	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS TNI
	511187	Belanja Tunjangan Guru/Dosen/PNS yang Dipekerjakan Pada Sekolah/PT Swasta PNS TNI
	511188	Belanja Tunjangan Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk Mengikuti Pendidikan Pasca Sarjana PNS TNI
	511189	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS TNI
	51119	Belanja Tunjangan-Tunjangan III PNS TNI
	511191	Belanja Tunjangan Medis PNS TNI
	511192	Belanja Tunjangan Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS TNI
	511193	Belanja Tunjangan Umum PNS TNI
	511194	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI
	511195	Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan pada Pulau Terluar dan Wilayah Perbatasan PNS TNI
	511197	Belanja Tunjangan Profesi atau Kehormatan Guru Besar PNS TNI/Polri
2	5112	Belanja Gaji dan Tunjangan TNI
	51121	Belanja Gaji TNI
	511211	Belanja Gaji Pokok TNI

	511219	Belanja Pembulatan Gaji Pokok TNI
	51122	Belanja Tunjangan-Tunjangan I TNI
	511221	Belanja Tunjangan Suami/Istri TNI
	511222	Belanja Tunjangan Anak TNI
	511223	Belanja Tunjangan Struktural TNI
	511224	Belanja Tunjangan Fungsional TNI
	511225	Belanja Tunjangan PPh TNI
	511226	Belanja Tunjangan Beras TNI
	511227	Belanja Tunjangan Kemahalan TNI
	511228	Belanja Tunjangan Lauk Pauk TNI
	511229	Belanja Uang Makan TNI
	51123	Belanja Tunjangan-Tunjangan II TNI
	511231	Belanja Tunjangan Anggota Cadangan TNI DDA TNI
	511232	Belanja Tunjangan Kowan TNI
	511233	Belanja Tunjangan Babinkamtibmas TNI
	511234	Belanja Tunjangan Khusus Papua untuk TNI
	511235	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI
	511236	Belanja Tunjangan Brevet TNI
	511237	Belanja Tunjangan Keahlian/Keterampilan TNI
	511238	Belanja Tunjangan Keterampilan Khusus TNI
	511239	Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan pada Pulau Terluar dan Wilayah Perbatasan TNI
	51124	Belanja Tunjangan-Tunjangan III TNI
	511241	Belanja Tunjangan Medis TNI
	511242	Belanja Tunjangan Lain-lain Termasuk Uang Duka TNI
	511243	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/ Sangat Terpencil TNI
	511244	Belanja Tunjangan Umum TNI
	511245	Belanja Santunan Cacat TNI
	511246	Belanja Tunjangan Khusus Wilayah Pulau Kecil Terluar/Perbatasan
	511247	Belanja Tunjangan Dosen TNI
3	5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara
	51131	Belanja Gaji Pejabat Negara
	511311	Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara
	511319	Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara
	51132	Belanja Tunjangan-Tunjangan I Pejabat Negara
	511321	Belanja Tunjangan Suami/Istri Pejabat Negara
	511322	Belanja Tunjangan Anak Pejabat Negara
	511323	Belanja Tunjangan Struktural Pejabat Negara
	511324	Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara
	511325	Belanja Tunjangan Beras Pejabat Negara
	51133	Belanja Tunjangan-Tunjangan II Pejabat Negara
	511331	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pejabat Negara
	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara
	511333	Belanja Uang Paket Harian Pejabat Negara
	511334	Belanja Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan Pejabat Negara
	511335	Belanja Pelayanan Sidang dan Penyelesaian Tugas Mendesak Pejabat Negara

	511336	Belanja Tunjangan Pembinaan Kegiatan dan Khusus BPK Pejabat Negara
	511337	Belanja Tunjangan Lain-lain Termasuk Uang Duka Pejabat Negara
	511338	Belanja Tunjangan Fasilitas KPK
	511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara (TPPN)
II.	52	BELANJA BARANG
A.	521	BELANJA BARANG
1	5211	Belanja Barang Operasional
	52111	Belanja Barang Operasional
	521111	Belanja Keperluan Perkantoran
		Pembelian Alat Tulis, Barang Cetak, Alat-alat Rumah Tangga dan Pengiriman
		Surat/Kawat
		Biaya Sewa Gudang/Kantor
		Biaya Pengepakan, Pengiriman, Penyimpanan Barang Langganan Surat Kabar/Majalah
		Biaya Rapat
		Biaya Pindah Kantor
		Biaya Cetak
		Biaya Penerimaan Tamu
		Biaya Bahan Komputer
		Biaya Foto Copy
		Biaya Telex/Perhubungan Khusus
		Pembelian Mesin Kantor, Alat Kantor, Mebel Kantor dan Alat Kesatrian termasuk Pemeliharaan bagi Perwakilan Luar Negeri (Athan)
	521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan
		ULP Non Organik (Jaga Kawal, Penderita, Tahanan/Tawanan)
		ULP Operasi Latihan
		- ULP Pendidikan
		ULP Perawatan Hewan/Satwa
	521113	Belanja Menambah Daya Tahan Tubuh
	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
	521116	Belanja Keperluan Perkantoran Atase Pertahanan Luar Negeri
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya
		Bekal/Alat-alat Kesehatan
		Jasa Angkutan Dalam Negeri
		Jasa Angkutan Luar Negeri (FMS)
		Dukungan Kodal
		Lain-lain Belanja Barang Operasional dan Latihan Termasuk Uang Makan Operasi
		Lain-lain Belanja Barang Pendidikan dan Latihan Termasuk Uang Makan Diklat
		Lain-lain Barang Lurja
		Dukungan Perawatan Jenazah
		Dukungan Khusus Renprogar (Termasuk Binku)
		Pengadaan Alat Olah Raga, Buku, Bijas, Bintel
		Belanja Barang Lainnya
		Lain-lain Belanja Barang Luar Negeri (Athan)
2	5212	Belanja Barang Non Operasional
	52121	Belanja Barang Non Operasional
	521211	Belanja Bahan BMP
	521212	Belanja Barang Transito

	521213	Belanja Honor Output Kegiatan
	521214	Belanja Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan RI/Atase Teknis
	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya
3	5218	Belanja Barang Persediaan
	52181	Belanja Barang untuk Persediaan
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
		Pembelian Alat Tulis, Barang Cetak, Alat-alat Rumah Tangga dan Pengiriman
		Surat/Kawat
		Biaya Sewa Gudang/Kantor
		Biaya Pengepakan, Pengiriman, Penyimpanan Barang Langganan Surat Kabar/Majalah
		Biaya Rapat
		Biaya Pindah Kantor
		Biaya Cetak
		Biaya Penerimaan Tamu
		Biaya Bahan Komputer
		Biaya Foto Copy
		Biaya Telex/Perhubungan Khusus
		Biaya Perkantoran Luar Negeri (Athan)
		Pembelian Mesin Kantor, Alat Kantor, Mebel Kantor dan Alat Kesatrian termasuk Pemeliharaan bagi Perwakilan Luar Negeri (Athan)
	521812	Belanja Barang Persediaan Amunisi
		Pemeliharaan Munisi Pengadaan Munisi
		Alkap Meriam
	52183	Belanja Barang Persediaan Bahan Lainnya
	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya
		Kaporlap Rutin
B.	522	BELANJA JASA
	5221	Belanja Jasa
	52211	Belanja Jasa
	522111	Belanja Langganan Listrik
	522112	Belanja Langganan Telepon
	522113	Belanja Langganan Air
	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya
	52212	Belanja Jasa Pos dan Giro
	522121	Belanja Jasa Pos dan Giro
	52213	Belanja Jasa Konsultan
	522131	Belanja Jasa Konsultan
	52214	Belanja Sewa
	522141	Belanja Sewa
	52215	Belanja Jasa Profesi
	522151	Belanja Jasa Profesi
	52219	Belanja Jasa Lainnya

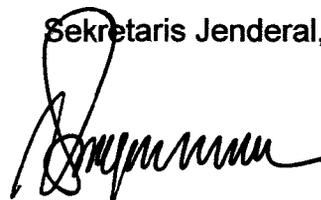
	522191	Belanja Jasa Lainnya
C.	523	BELANJA PEMELIHARAAN
	5231	Belanja Pemeliharaan
	52311	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
	52312	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
		Pemeliharaan Mesin Stationer
		Pemeliharaan Alat-alat Besar
		Pemeliharaan Komlek/Alhub
		Pemeliharaan Alat Kesehatan/Lab. Kesehatan
		Pemeliharaan Lain-lain
	523123	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
		Kendaraan Bermotor pada pengadaan Sucad/komponen/alkap
		Pemeliharaan Senjata Ringan/Berat
		Pemeliharaan Alang Air
	523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	52313	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan
	523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan
	523134	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	523135	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Irigasi
	523136	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan
	52319	Belanja Pemeliharaan Lainnya
	523191	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya
	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya
D.	524	BELANJA PERJALANAN
1	5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri
	52411	Belanja Perjalanan Dalam Negeri
	524111	Belanja Perjalanan Biasa
	524112	Belanja Perjalanan Tetap (Dalam Negeri)
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
2	5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri
	52421	Belanja Perjalanan Luar Negeri
	524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri
	524212	Belanja Perjalanan Tetap - Luar Negeri
	524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri
E.	526	BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMDA
	5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
	52611	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

	526111	Belanja Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
	526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
	526113	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
III.	53	BELANJA MODAL
A.	531	BELANJA MODAL TANAH
1	5311	Belanja Modal Tanah
	53111	Belanja Modal Tanah
	531111	Belanja Modal Tanah
	531112	Belanja Modal Pembebasan Tanah
	531113	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah
	531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah
	531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
	531116	Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah
	531117	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
2	5312	Belanja Modal Tanah Untuk Pencatatan Tanah dari Hibah
	53121	Belanja Modal Tanah Untuk Pencatatan Tanah dari Hibah
	531211	Belanja Modal Tanah Untuk Pencatatan Tanah dari Hibah
B.	532	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
1	5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
	53211	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
	532112	Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin
	532113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
	532114	Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin
	532115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin
	532116	Belanja Modal Perijinan Peralatan dan Mesin
	532117	Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin
	532118	Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin
	53212	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin
	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin
2	5322	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Untuk Pencatatan Peralatan dan Mesin dari Hibah
	53221	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Untuk Pencatatan Peralatan dan Mesin dari Hibah
	532211	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Untuk Pencatatan Peralatan dan Mesin dari Hibah
C.	533	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
1	5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
	53311	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
	533112	Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan
	533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan
	533114	Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan
	533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan
	533116	Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan

	533117	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Gedung dan Bangunan
	533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan
	53312	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
2	5332	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Untuk Pencatatan Gedung dan Bangunan Dari Hibah
	53321	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Untuk Pencatatan Gedung dan Bangunan Dari Hibah
	533211	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Untuk Pencatatan Gedung dan Bangunan Dari Hibah
D.	534	BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
1	5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan
	53411	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan
	534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan
	534112	Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan
	534113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan
	534114	Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan
	534115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan
	534116	Belanja Modal Perijinan Jalan dan Jembatan
	534117	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Jalan dan Jembatan
	534118	Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan
	53413	Belanja Modal Jaringan
	534131	Belanja Modal Jaringan
	534132	Belanja Modal Bahan Baku Jaringan
	534133	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan
	534134	Belanja Modal Sewa Peralatan Jaringan
	534135	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan
	534136	Belanja Modal Perijinan Jaringan
	534137	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Jaringan
	534138	Belanja Modal Perjalanan Jaringan
	53414	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan
	534141	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan
	53415	Belanja Penambahan Nilai Irigasi
	534151	Belanja Penambahan Nilai Irigasi
	53416	Belanja Penambahan Nilai Jaringan
	534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan
2	5342	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan Dari Hibah
	53421	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah
	534211	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah

E.	536	BELANJA MODAL LAINNYA
	5361	Belanja Modal Lainnya
	53611	Belanja Modal Lainnya
	536111	Belanja Modal Lainnya
	53612	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya
	536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya

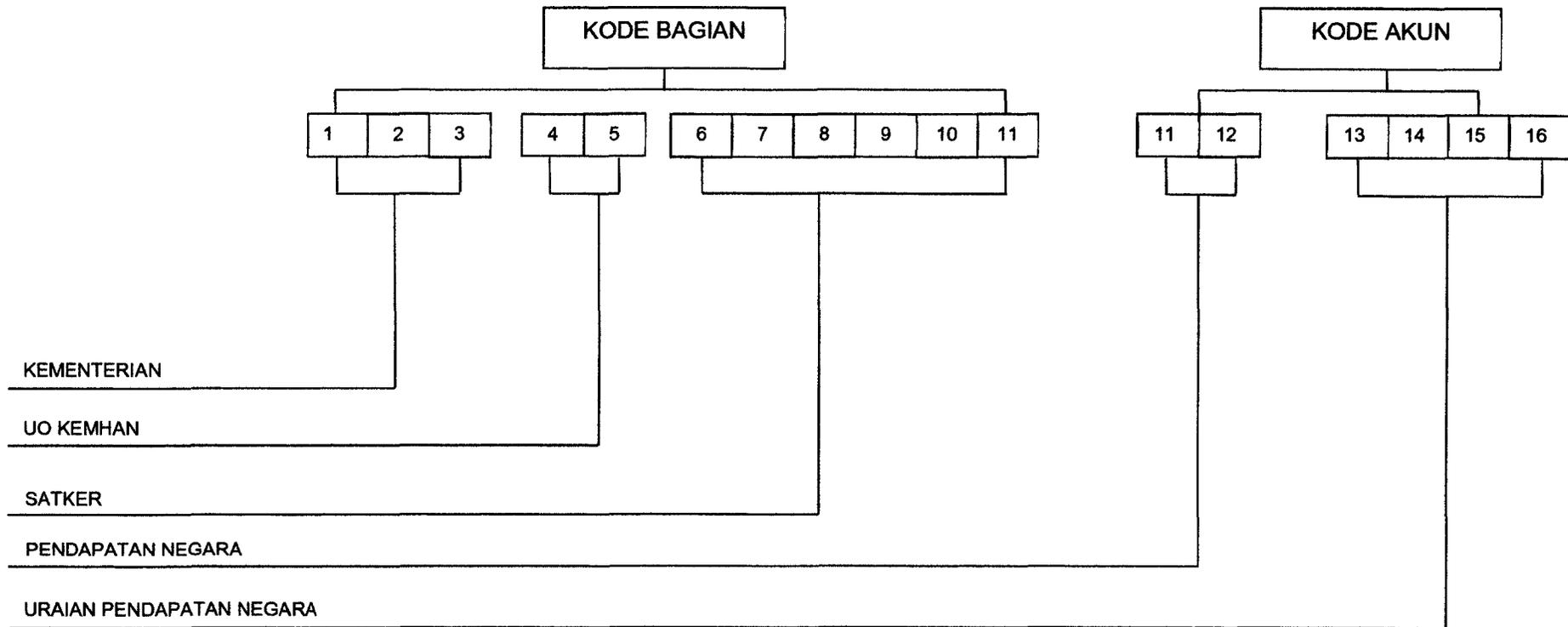
Sekretaris Jenderal,



Donny Ermawan T., M.D.S.
Marsekal Madya TNI

Sublampiran E
dari Lampiran Surat Keputusan Sekjen Kemhan
Nomor : **kep / 195** / III / 2022
Tanggal : **22** Februari 2022

SUSUNAN NOMOR KODE PROGRAM DAN ANGGARAN PENDAPATAN



Sekretaris Jenderal,

Donny Ermawan T., M.D.S.

Marsekal Madya TNI

1	2	3	4
4.	683009	PUSAT KELAIKAN KEMHAN	Gd. AH. Nasution Lt.14 Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat
5.	683787	BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN SETJEN KEMHAN	Gd. S. Parman Jl. Medan Merdeka Barat No.13-14 Jakarta Pusat
8.	683813	INSPEKTORAT JENDERAL KEMHAN	Gd. Jenderal Gatot Subroto Lt.1 Jl. Medan Merdeka Barat No.13-14 Jakarta Pusat
9.	683820	DITJEN STRAHAN KEMHAN	Gd. Ahmad Yani Jl. Medan Merdeka Barat No.13-14 Jakarta Pusat
10.	683834	DITJEN RENHAN KEMHAN	Gd.M.Sjafruddin Prawiranegara Lt.3 Jl. Budi Kemuliaan No.4-6 Jakarta Pusat
11.	683841	DITJEN POTHAN KEMHAN	Gd. Jenderal Suprpto Lt.3 Jl. Tanah Abang Timur No.8 Jakarta Pusat
12.	683855	DITJEN KUATHAN KEMHAN	Gd. DI. Panjaitan Lt.2 Jl. Tanah Abang Timur No.7 Jakarta Pusat
13.	683862	BARANAHAN KEMHAN	Gd. AH. Nasution Lt.11 & 12 Jl. Medan Merdeka Barat No.13-14 Jakarta Pusat
14.	683876	BADIKLAT KEMHAN	Gd. Ki Hajar Dewantoro Lt.2 Jl. Salemba Raya No.14 Jakarta Pusat
15.	683880	BALITBANG KEMHAN	Gd. Soepomo Lt.3 Jl. Pangkalan Jati No.1 Pondok Labu Jakarta Selatan
16.	683897	UNIVERSITAS PERTAHANAN RI	Jl. Kawasan Unhan IPSC Sentul, Bogor Jawa Barat
17.	686023	BIRO TU DAN PROTOKOL SETJEN KEMHAN	Gd. Jenderal Gatot Subroto Lt.1 Jl. Medan Merdeka Barat No.13-14 Jakarta Pusat
18.	686030	BIRO UMUM SETJEN KEMHAN	Gd. Pierre Tendean Lt.3 Jl. Tanah Abang Timur No.4 Jakarta Pusat
19.	686044	PUSLAPBINKUHAN KEMHAN	Gd. AH. Nasution Lt.16 Jl. Medan Merdeka Barat No.13-14 Jakarta Pusat
20.	686051	PUSDATIN KEMHAN	Gd.Untung Suropati Lt.1 Jl. Fatmawati No.1 Jakarta Selatan
21.	686065	PUSREHAB KEMHAN	Gd. Jenderal M.T. Haryono Jl. R.C Veteran No.178 Bintaro Jakarta Selatan

NOMOR KODE BAGIAN PENDAPATAN

Nomor Kode Bagian ditempatkan pada kelompok pertama dalam susunan Nomor Kode Program dan Anggaran Pendapatan, terdiri dari 10 digit yang meliputi Nomor Kode Kementerian, Nomor Kode Unit Organisasi, dan Nomor Kode Satker, dengan susunan sebagai berikut:

1. Nomor Kode Kementerian.

Nomor Kode Kementerian terdiri dari 3 digit yang menempati digit ke-1, ke-2 dan ke-3 dalam susunan Nomor Kode Program dan Anggaran Pendapatan.

NOMOR KODE KEMENTERIAN	URAIAN
012	Kementerian Pertahanan (Kemhan)

2. Nomor Kode Unit Organisasi (UO).

Nomor Kode Unit Organisasi terdiri dari 2 digit yang menempati digit ke-4 dan ke-5 dalam susunan Nomor Kode Program dan Anggaran Pendapatan.

NOMOR KODE UNIT ORGANISASI (UO)	URAIAN
01	UO KEMHAN

3. Nomor Kode Satker.

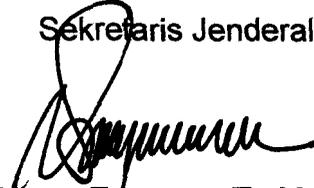
Nomor Kode Satuan Kerja UO Kemhan terdiri dari 6 digit yang menempati digit ke-6 sampai dengan ke-11 dalam susunan Nomor Kode Program dan Anggaran Pendapatan

NO URUT	NOMOR KODE SATKER/	SATUAN KERJA (SATKER)	ALAMAT
1	2	3	4
1.	461838	BAINSTRAHAN KEMHAN	Gd. Stand By Force Lt. 2 PMPP TNI Jl. Anyar Sentul, Bogor Jawa Barat
2.	683005	BIRO ORTALA SETJEN KEMHAN	Gd. S. Parman Jl. Medan Merdeka Barat No.13-14 Jakarta Pusat
3.	683007	BIRO PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SETJEN KEMHAN	Gd. Ahmad Yani Jl. Medan Merdeka Barat No.13-14 Jakarta Pusat

6. 683791 ...

1	2	3	4
22.	686072	BIRO HUMAS SETJEN KEMHAN	Gd. AH. Nasution Lt.14 Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat
23.	683810	PUSAT CADANGAN LOGISTIK STRATEGIS	Gd. AH. Nasution Lt.13 Jl. Medan Merdeka Barat NO. 13-14

Sekretaris Jenderal,



Donny Ermawan T., M.D.S.
Marsekal Madya TNI

Sublampiran G
 dari Lampiran Keputusan Sekjen Kemhan
 Nomor : KEP / 195 / III / 2022
 Tanggal : 22 Februari 2022

KODE AKUN PENDAPATAN

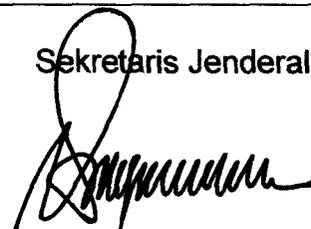
Nomor Kode Akun Pendapatan ditempatkan pada kelompok kedua dalam susunan Nomor Kode Program dan Anggaran pendapatan, terdiri dari 6 digit yang meliputi digit ke-12 dan ke-13 menunjukkan Jenis Belanja dan digit ke-14 sampai dengan ke-17 menunjukkan Uraian Pendapatan Negara.

NO. URUT	KODE AKUN PENDAPATAN	URAIAN
	4	PENDAPATAN NEGARA
I	41	PENDAPATAN PERPAJAKAN
	411	PENDAPATAN PAJAK DALAM NEGERI
	4111	Pendapatan Pajak Penghasilan
	41112	Pendapatan PPh Non-Migas
	411121	Pendapatan PPh Pasal 21
	411122	Pendapatan PPh Pasal 22
	411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor
	411124	Pendapatan PPh Pasal 23
	411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi
	411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan
	411127	Pendapatan PPh Pasal 26
	411128	Pendapatan PPh Final
	411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya
II	42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
	425	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA
1	4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha
	42512	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN
	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan
	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
	425123	Pendapatan Kopensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III
	425124	Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan
	425125	Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin
	425126	Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan
	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
	42513	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN
	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
	425132	Pendapatan Sewa Peralatan Mesin

NO. URUT	KODE AKUN PENDAPATAN	URAIAN
	425133	Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan
	425134	Pendapatan dari KSP tanah, Gedung dan Bangunan
	425135	Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin
	425136	Pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi dan Jaringan
	425137	Pendapatan dari Bangun, Guna dan Serah (BGS)
	425138	Pendapatan dari Bangun, Serah dan Guna (BSG)
	425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya
2	4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan
	42531	Pendapatan Jasa Kesehatan
	425311	Pendapatan dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FTKP)
	425312	Pendapatan dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FTKP)
	425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan
	425314	Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan
	425315	Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan
	425316	Pendapatan Registrasi Tenaga Kesehatan
3	4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan
	42576	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening
	425761	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan
	425762	Pendapatan Jasa Bank dari Pemberian Pinjaman
	425763	Pendapatan Biaya Lain-lain pemberian Pinjaman
	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
	425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening
	42579	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara
	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri, Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
	425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara
	425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga
4	4258	Pendapatan Denda
	42581	Pendapatan Denda I
	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
5	4259	Pendapatan Lain-Lain
	42591	Penerimaan Kembali Belanja Tahun anggaran Yang Lalu I
	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
	425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun anggaran Yang lalu

NO. URUT	KODE AKUN PENDAPATAN	URAIAN
	42593	Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan
	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS
	425932	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan
	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain

Sekretaris Jenderal,



Donny Ermawan T., M.D.S.
Marsekal Madya TNI

Sublampiran H
dari Lampiran Keputusan Sekjen Kemhan
Nomor : **KeP / 195 / III / 2022**
Tanggal : **22** Februari 2022

SATKER PENERIMA DIPA

NO.	PENERIMA DIPA		
	KODE	SATKER	KPPN/LOK – KAB KOTA
1	2	3	4
1.	683005	BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SETJEN KEMHAN	019/01.51 - KOTA JAKARTA PUSAT
2.	683007	BIRO PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SETJEN KEMHAN	019/01.51 - KOTA JAKARTA PUSAT
3.	683009	PUSAT KELAIKAN KEMHAN	019/01.51 - KOTA JAKARTA PUSAT
4.	683787	BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN SETJEN KEMHAN	019/01.51 - KOTA JAKARTA PUSAT
5.	683791	BIRO KEPEGAWAIAN SETJEN KEMHAN	019/01.51 - KOTA JAKARTA PUSAT
6.	683809	BIRO HUKUM SETJEN KEMHAN	019/01.51 - KOTA JAKARTA PUSAT
7.	683813	INSPEKTORAT JENDERAL KEMHAN	019/01.51 - KOTA JAKARTA PUSAT
8.	683820	DITJEN STRAHAN KEMHAN	019/01.51 - KOTA JAKARTA PUSAT
9.	683834	DITJEN RENHAN KEMHAN	019/01.51 - KOTA JAKARTA PUSAT
10.	683841	DITJEN POTHAN KEMHAN	019/01.51 - KOTA JAKARTA PUSAT
11.	683855	DITJEN KUATHAN KEMHAN	019/01.51 - KOTA JAKARTA PUSAT
12.	683862	BARANAHAN KEMHAN	019/01.51 - KOTA JAKARTA PUSAT
13.	683876	BADIKLAT KEMHAN	019/01.51 - KOTA JAKARTA PUSAT
14.	683880	BALITBANG KEMHAN	019/01.51 - KOTA JAKARTA PUSAT
15.	686023	BIRO TU DAN PROTOKOL SETJEN KEMHAN	019/01.51 - KOTA JAKARTA PUSAT
16.	686030	BIRO UMUM SETJEN KEMHAN	019/01.51 - KOTA JAKARTA PUSAT
17.	686044	PUSLAPBINKUHAN KEMHAN	019/01.51 - KOTA JAKARTA PUSAT
18.	686051	PUSDATIN KEMHAN	019/01.51 - KOTA JAKARTA PUSAT
19.	686065	PUSREHAB KEMHAN	019/01.51 - KOTA JAKARTA PUSAT
20.	686072	BIRO HUMAS SETJEN KEMHAN	019/01.51 - KOTA JAKARTA PUSAT
21.	461838	BAINSTRAHAN KEMHAN	023/ 02.05 - KAB. BOGOR
22.	683897	UNHAN	023/ 02.05 - KAB. BOGOR
23.	683810	PUSAT CADANGAN LOGISTIK STRATEGIS	019/01.51 - KOTA JAKARTA PUSAT

Sekretaris Jenderal,


Donny Ermawan T., M.D.S.
Marsekal Madya TNI